

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MELALUI KOPERASI CREDIT UNION (CU)  
Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak**

*Community Empowerment by Means of Credit Union Cooperative (CU)  
(Studies at CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak)*

**Ayub Barombo<sup>1</sup>, Prof.Dr.H. Asrori, M.Pd<sup>2</sup>, Drs. Donatianus BSEP, M.Hum<sup>3</sup>**  
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRACT**

This study aimed to describe the model of empowerment conducted by Credit Union and also to know the shapes of products provided to its members. Based on the results of this study indicate that the Credit Union (CU) as a public institution, the activities are not directly apply the process of community empowerment as CU facilitate cooperative society in terms of economic and social development. CU Board. Equatorial Bakti is committed to the welfare of its members by promoting its members as economic actors. In addition to the increase welfare / income then there is also change in the value of the social life in the community. This is as a result of work done by someone who will bring success. This has an impact on the success of the changes in both the private self and the society.

**Keywords:** CU, society Empowerment, Change.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Credit Union selain itu juga untuk mengetahui bentuk-bentuk produk yang diberikan kepada para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Credit Union (CU) sebagai suatu lembaga masyarakat, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena koperasi CU mawadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial. Pengurus CU. Khatulistiwa Bakti memiliki komitmen untuk mensejahterakan anggotanya dengan mengedepankan anggotanya selaku pelaku ekonominya. Selain itu pula dengan peningkatan kesejahteraan/pendapatan maka terjadi pula perubahan nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sebagai hasil kerja keras yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuahakan keberhasilan. Keberhasilan ini berdampak pada perubahan-perubahan baik dalam diri pribadinya maupun terhadap lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci :** CU, Pemberdayaan Masyarakat, Perubahan.

<sup>1</sup> PNS Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Barat.

<sup>2</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## PENDAHULUAN

Kemiskinan yang dialami oleh sebagian penduduk atau rakyat Indonesia menjadi latar belakang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Berbagai sumber dapat kita lihat yang membahas tentang kemiskinan baik media elektronik maupun di media cetak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan kemiskinan yang dialami oleh rakyatnya. Pemerintah, melalui berbagai kajian terus mencari solusi dan alternatif penyelesaian yang tepat hingga dapat mengatasinya, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan membuka lapangan kerja dari aspek ekonomi salah satunya adalah melalui koperasi. Berlandaskan pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat 1 yang menyebutkan : *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”*. Pada penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan azas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Koperasi sebagai salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud. Koperasi sebagai salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini dikarenakan koperasi memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud (Badaruddin dkk, 2005).

Pembangunan koperasi identik dengan mengatasi kemiskinan. Menurut Bung Hatta, koperasi yang berazaskan pasal 33 UUD 1945 merupakan satu-satunya jalan untuk mendekatkan jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin (Mubyarto 2003:10). Secara makro dapat dilihat peranan koperasi yang semakin melembaga dalam perekonomian, antara lain; meningkatnya manfaat koperasi bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas, sendi serta tata kerja koperasi; meningkatnya produksi, pendapatan dan kesejahteraan; meningkatnya pemerataan dan keadilan; meningkatnya kesempatan kerja. Semua ini mengakibatkan pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung pada *Co-operative Growth*, *Cooperative Share* dan *Co-operative Effect* yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mengatasi kemiskinan (Sukamdiyo, 1996).

*Credit Union* (CU) merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki program pendidikan, pembinaan kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan. Setiap anggotanya adalah pilar-pilar yang sangat berpengaruh

terhadap keberhasilannya. Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak anggota secara bertanggung jawab (Widiyanti N,2002). Dalam pelaksanaan tak jarang dijumpai badan hukum koperasi yang terbentuk namun belum mampu mengangkat kesejahteraan anggotanya, selain itu banyak pula kita temui koperasi tersebut hanya menguntungkan para pengurusnya sendiri.

Data CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak per 30 September 2012 jumlah anggota yang telah bergabung dengan koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti tercatat sebanyak 39.916 orang, yang terbagi atas 21.655 orang laki-laki dan 18.261 orang perempuan, Peminjam sebanyak 16.983 orang. Kepada anggota yang sebanyak tersebut diatas tentulah koperasi credit union harus berupaya untuk mempertahankan jumlah anggota bahkan harus terus meningkatkan jumlah anggotanya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada katagori jenis penelitian deskriptif, mengingat penelitian ini akan berupaya untuk menggambarkan kondisi dan kenyataan tentang pemberdayaan masyarakat melalui koperasi credit union, berdasarkan fakta dan data sebagaimana adanya dilapangan.

Subjek penelitian ini adalah :

- a. Para Pengurus Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti sebanyak 3 orang
- b. Anggota Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti sebanyak 15 orang.
- c. Dinas/Instansi Pembinaan Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bhakti.

Teknik Pengumpulan Data 1. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan yang dipilih secara sengaja (*purposive*). Tujuan wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengetahuan, pemahaman yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan terhadap pengurus dan anggota koperasi serta perubahan sosial anggota sebagai dampak dari pemberdayaan masyarakat. Jawaban informan merupakan hasil temuan penelitian yang merupakan sumber data yang ditelusuri, dan wawancara mendalam dilakukan sefleksibel mungkin, sehingga memungkinkan terjadinya proses dialog secara individual atau terhadap beberapa informan sekaligus. Pencatatan data dan wawancara dilakukan secara manual dengan bantuan alat perekam. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain :

- a. Mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*)
- b. Menentukan informan yang dapat memberikan informasi mengenai model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, jenis produk, manfaat CU dan dampak keberhasilan pemberdayaan masyarakat.
- c. Menghubungi informan untuk diwawancarai mengenai model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, jenis produk, manfaat CU dan dampak keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

- d. Melakukan wawancara untuk menjangkau informasi dan data penelitian dengan menggunakan alat tulis, dan alat perekam serta alat dokumentasi.
- e. Melakukan konfirmasi atau check dan recheck terhadap sumber informasi.
- f. Merekap hasil wawancara dan data untuk dianalisis dan dikaji.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menggali secara rinci menurut fokus penelitian. Gambaran dari data yang diperoleh diharapkan tidak hanya menyangkut keseluruhan aspek yang diteliti, tetapi juga dapat mengungkap segala sesuatu yang mempunyai hubungan erat dan relevan dengan fokus penelitian. 2.Observasi Partisipasi (*Participant Observation*) Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau studi lapangan atau kerja lapangan. Observasi partisipasi dilakukan dengan maksud agar memungkinkan peneliti mendapatkan pengalaman secara langsung dilapangan, dengan melihat dan menemukan sendiri. Kemudian memotret proses kegiatan dengan pengurus dan anggota koperasi dengan pola partisipasi. Pengamatan dilakukan dengan cara berperan serta selain berperan sebagai pengamatan sekaligus juga menjadi bagian dari kelompok yang diamati.

Observasi partisipasi dilakukan melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian, pada Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak. Hasil observasi ditulis secara rinci dan sistematis dalam *field notes* (catatan lapangan).

Pengumpulan data dilapangan dengan cara observasi partisipasi dilakukan dengan langkah-langkah :

- a. Tinggal, bergaul dan menjadi bagian dari masyarakat objek penelitian
- b. Mempersiapkan pedoman observasi
- c. Mencatat hasil observasi secara sistematis
- d. Melakukan klasifikasi data lapangan
- e. Menyusun data hasil observasi
- f. Melakukan penyempurnaan data lapangan dengan reduksi data, pengorganisasi data, dan interpretasi data.

Teknik Analisa Data, setelah memperoleh data yang diperlukan maka semua data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis oleh peneliti sesuai klasifikasi, makna dan kegunaannya. Analisis data adalah proses penyusunan dan penggolongan data dan mengungkapkan objek yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi yang memiliki prinsip gotong royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan sehingga sangat tepat menjadi salah satu lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud.

Dari sekian banyaknya jenis koperasi di Indonesia, yang berkembang dengan baik dan mandiri adalah jenis koperasi credit union, yang oleh jajaran pemerintah dikenal dengan panggilan kopdit (Koperasi Kredit) dan oleh masyarakat lebih akrab disebut *Credit Union* (CU). *Credit Union* (CU) adalah

sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Sebagai lembaga keuangan mikro *non bank*, dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (*micro finance*) dengan amat baik, yakni menyediakan jasa keuangan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya.

Produk koperasi credit union yang berupa simpanan adalah merupakan bentuk simpanan/tabungan anggota sehingga menjadikan anggota terbiasa untuk menabung sebagian dari pendapatannya. Selain itu pula simpanan ini sekaligus merupakan jaminan atas pinjaman anggota serta sebagai saham bagi anggota tersebut.

Dalam rangka mengembangkan dan kemajuan lembaga koperasi sekaligus untuk memberikan bantuan modal usaha maka berbagai pinjaman diberikan kepada anggota. Dengan berpedoman pada filosofi CU yang utama adalah keswadayaan. Kredit diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan diantara anggota. Untuk itu CU menetapkan beberapa aturan agar seseorang bisa mendapatkan kredit, salah satunya hadir rutin dalam pertemuan kelompok, prestasinya dalam menabung, dan tak bermasalah dalam pembayaran pinjaman.

Selanjutnya dapat ditelaah bantuan dari CU adalah mendorong dan meningkatkan ketekunan anggota. Anggota dididik melalui pendidikan motivasi dan pendidikan dasar agar terjadi perubahan pola pikir dalam mengatur ekonomi rumah tangganya. Anggota dididik untuk merancang masa depannya dengan hidup hemat dan tekun berusaha. Demikian pula makna uang bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi sebuah sarana untuk mencapai tujuan.

Pengurus CU. Khatulistiwa Bakti memiliki komitmen untuk mensejahterakan anggotanya dengan mengedepankan anggotanya selaku pelaku ekonominya. Hal ini senada dengan konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (populer) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat

di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Searah ungkapan Mubyarto (1999:71), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( *network* ) yang menghubungkan-hubungkan sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.

Ekonomi kerakyatan dan doktrin ekonomi Indonesia muncul dari falsafah Pancasila yang merupakan subsistem dari UUD 1945. Pasal utama bertumpunya doktrin ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal-pasal itu bila dikaitkan dengan kerangka kerja ekonomi kerakyatan jelas mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab dalam ekonomi kerakyatan memuat pesan-pesan moral yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan serta berintikan kerakyatan.

Ungkapan yang telah disampaikan diatas dapat ditelaah bahwa sistem ekonomi kerakyatan akan sanggup mengakomodasi kebhinekaan yang ada di setiap daerah karena berpusat pada rakyat sehingga menghargai dan mempertimbangkan prakarsa dan perbedaan lokal. Pembangunan yang berpusat pada rakyat mensyaratkan desentralisasi yang cukup besar dalam proses pembuatan keputusan maupun pelaksanaan.

Dasar yang melandasi konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat:

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijaksanaan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas
2. Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem yang swa-organisasi



3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian modal.

Manfaat menjadi anggota CU, yaitu :

1. Mengubah pola pikir. Pendapat salah seorang pengurus Koperasi Credit Khatulistiwa Bakti Pontianak. Menurutnya, manfaat CU bagi anggota adalah mengubah pola pikir. Maksudnya, dari yang terbiasa instan langsung memanfaatkan uang saat mendapat pinjaman menjadi menciptakan modal dahulu dengan menabung secara rutin. Jika telah tercipta modal atau tabungan, baru memanfaatkan atau meminjam. "Inilah yang tidak ditemukan di lembaga keuangan lainnya," katanya.
1. Terbiasa menabung. Pada awalnya, sebagian besar anggota CU tidak biasa menabung secara rutin. Tetapi setelah menjadi anggota dan banyak belajar, mereka pun akhirnya menyadari manfaat menabung rutin itu. Apalagi dengan menabung, anggota mendapatkan balas jasa simpanan (BJS). Jika menjadi anggota CU, seorang anggota mesti menabung untuk meningkatkan modal. "Menabung sistem CU berbeda dengan menabung secara 'tradisional' di lembaga lain, misalnya bank, setelah menabung, uang itu ditarik untuk dipergunakan. Tetapi di CU, lebih modern karena ada dana yang tersimpan. Anggota CU selalu mempunyai uang dalam bentuk tabungan yang terus meningkat, dan selalu bisa memanfaatkan tabungan untuk meningkatkan jumlah untuk menciptakan aset", katanya.
2. Mudah mendapat pinjaman modal usaha. Persoalan klasik dalam pengembangan usaha salah satunya adalah aspek permodalan, dengan bergabung di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti pinjaman uang memang diarahkan untuk pengembangan usaha sehingga anggota akan mendapatkan akses kemudahan dengan persyaratan mudah tidak berbeli-belit".
3. Solusi dalam ketidakberdayaan. Bergabung dengan CU Khatulistiwa Bakti dapat memberikan solusi atas ketidakberdayaan, karena ketika anggota mendapatkan musibah dan tidak memiliki uang maka CU mampu untuk memberikannya.
4. Mendapatkan bagi hasil. Dari isi ketentuan perundang-undangan tersebut dapat dilihat secara jelas apa arti SHU dari sebuah koperasi, sehingga memiliki makna dan nilai yang berbeda dengan pengertian laba yang didapat oleh sebuah perusahaan bukan koperasi. Pembagian SHU yang diterima oleh masing-masing anggota jumlahnya sering memperlihatkan perbedaan yang mencolok, hal ini disebabkan adanya perbedaan dari besar kecil jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada seluruh kegiatan usaha koperasi. Semakin banyak kontribusi dan partisipasi langsung anggota dengan

koperasinya, maka semakin besar partisipasi anggota tersebut terhadap percepatan dan pembentukan pendapatan hasil usaha koperasi.

5. Tidak diskriminatif. CU tidak diskriminatif terhadap semua latar belakang anggota, termasuk suku, orientasi, kebangsaan, seks, agama, dan politik.

Sejalan dengan telaahan diatas peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran dan kejelasan dalam hal keanggotaan. Hal ini mengacu secara khusus pada pemahaman anggota dan masyarakat akan perbedaan hak dan kewajiban serta manfaat yang dapat diperoleh menjadi anggota atau tidak menjadi anggota. Jika terdapat keanggotaan yang jelas, maka manfaat yang diterima anggota tidak akan diterima oleh non-anggota. Pada gilirannya hal ini kemudian akan menumbuhkan kesadaran kolektif dan loyalitas anggota kepada organisasinya yang kemudian akan menjadi basis kekuatan koperasi itu sendiri (Hendrojogi, 1997).

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan anggota sebagai pelaku utamanya. Hal ini tampak jelas atas upaya koperasi credit union yang selalu memberikan sarana dan fasilitas untuk anggota agar menjadi lebih berdaya. Misalnya, dengan kegiatan simpan pinjam dan masyarakat dapat menyimpan (menabung) uang mereka maupun meminjam uang sebagai modal usaha mereka.

Ternyata upaya yang telah dilakukan tersebut diatas mampu memotivasi anggotanya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Atas pengembangan diri anggotanya tersebut banyak terjadi perubahan-perubahan baik dalam dirinya sendiri dan maupun lingkungan. Perubahan bisa terjadi setiap saat, dan merupakan proses yang dinamik serta tidak dapat dielakkan. Berubah berarti beranjak dari keadaan yang semula. Tanpa berubah tidak ada pertumbuhan dan tidak ada dorongan.

Analisis atas jawaban-jawaban singkat sebagai hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap anggota CU. Khatulistiwa Bakti Melihat kondisi yang dialami oleh anggota *Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak* tersebut nampak bahwa telah terjadinya peningkatan kesejahteraan/pendapatan maka terjadi pula pergeseran nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sebagai hasil kerja keras yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuahkan keberhasilan. Keberhasilan ini berdampak pada perubahan-perubahan baik dalam diri pribadinya maupun terhadap lingkungan masyarakat. Perubahan sebagai respon atas terjadinya kebiasaan hidup, peningkatan pendapatan sehingga terjadi pula pergeseran nilai-nilai kehidupan sosial dan dapat dikatakan sebagai perubahan sosial baik dalam diri sendiri maupun kehadirannya ditengah-tengah masyarakat.

Perubahan sebagaimana yang diungkapkan oleh (Atkinson,1987 dan Brooten,1978 dalam Nurhidayah, 2003 : 1), bahwa perubahan itu merupakan



kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan :

- (1) *Unfreezing*: suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau adanya kebutuhan untuk berubah
- (2) *Changing*: langkah tindakan, baik memperkuat driving forces maupun memperlemah resistences, dan
- (3) *Refreezing*: membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru (*a new dynamic equilibrium*).

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, atau karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, dikarenakan berubahnya sistem komposisi penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial, maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya. Perubahan ini menyangkut pada seluruh segmen yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu. Perubahan sosial dalam masyarakat bukan merupakan sebuah hasil atau produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan bersama yang diambil oleh anggota masyarakat. Konsep dinamika kelompok menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial.

Berdasarkan besar kecilnya pengaruh yang terjadi pada masyarakat, perubahan sosial dibagi menjadi 2, yakni perubahan sosial yang besar dan perubahan sosial yang kecil. Perubahan sosial yang besar pada umumnya adalah perubahan yang akan membawa pengaruh yang besar pada masyarakat. Misalnya, terjadinya proses industrialisasi pada masyarakat yang masih agraris. Di sini lembaga-lembaga kemasyarakatan akan terkena pengaruhnya, yakni hubungan kerja, sistem pemilikan tanah, klasifikasi masyarakat, dan lainnya. Sedangkan perubahan sosial yang kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa akibat yang langsung pada masyarakat. Misalnya, perubahan bentuk potongan rambut pada seseorang, tidak akan membawa pengaruh yang langsung pada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tidak akan menyebabkan terjadinya perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Dalam analisis Sayogyo (1985:119), perubahan sosial adalah interaksi antar individu, organisasi yang menyangkut struktur sosial, nilai norma dan peranan. Ia melihat pada perubahan struktur, lembaga kemasyarakatan antar interaksi sosial,

stratifikasi sosial dan hubungan sosial yang terjadi pada masyarakat. Davis dan Cohen (dalam Darusman, 1995:70) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Moore (dalam Lauer 1993:4), memberi arti bahwa perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial, karena mencakup berbagai pernyataan tentang struktur seperti norma, nilai dan gejala budaya. Umar (1986:41), perubahan sosial biasanya menyangkut perubahan struktur, nilai-nilai dan tata hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Hasim (dalam Garna, 1992:13), mengemukakan perubahan sosial ialah sebaran penyesuaian yang berlaku kepada pola interaksi antara individu-individu sebagai unit sosial dalam sebuah masyarakat.

Perubahan sosial dapat diketahui bahwa telah terjadi dalam masyarakat dengan membandingkan keadaan pada dua atau lebih rentang waktu yang berbeda. Misalnya struktur masyarakat Indonesia pada masa pra kemerdekaan, setelah merdeka, orde lama, orde baru, reformasi, dst.

Yang harus dipahami adalah bahwa suatu hal baru yang sekarang ini bersifat radikal, mungkin saja beberapa tahun mendatang akan menjadi konvensional, dan beberapa tahun lagi akan menjadi tradisional.

Bahwa perubahan sosial dapat dipastikan terjadi dalam masyarakat, karena adanya ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, setiap masyarakat pasti berubah, hanya ada yang cepat dan ada yang lambat.
- b) Perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan pada lembaga lain.
- c) Perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi sosial
- d) Disorganisasi sosial akan diikuti oleh reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi.
- e) Perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja, keduanya akan kait-mengkait.

Perubahan sosial yang terjadi pada anggota Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti terlihat pada :

1. Stratifikasi Sosial
2. Struktur Sosial
3. Interaksi Sosial

## TINJAUAN PUSTAKA

Keuntungan penerapan pembangunan berorientasi/berpusat pada rakyat adalah: kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan, koordinasi dapat dibangun secara harmonis dan lancar, terbangun rasa simpatik masyarakat terhadap karya pembangunan, menumbuhkan tanggung jawab dalam memelihara sarana prasarana yang telah dibangun bersama serta kendala yang timbul atau akan timbul dapat diatasi secara lebih mudah dan dini.

Penerapan pemberdayaan masyarakat paling banyak digunakan di sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Empat jalur strategis yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu perluasan kesempatan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Perluasan kesempatan ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan untuk menjamin semua masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tiga sisi yaitu penyadaran, pembangunan kapasitas, dan pendayaan. Pada sisi pertama, penyadaran, target masyarakat diberikan pemahaman-pemahaman tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, kepercayaan, dan penyembuhan. Sisi kedua adalah peningkatan kapasitas atau memberikan kemampuan. Peningkatan kapasitas terdiri dari tiga jenis yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Sisi terakhir adalah pendayaan. Memberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 3 – 6).

Secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* dan *operation* yang berarti usaha bersama. Secara legal formal, di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

UU No.17/2012 Tentang Perkoperasian mendefinikan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Definisi lain Munaldus,dkk; (2012 : 2) Credit Union adalah koperasi keuangan yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota dimana para anggota adalah penabung, peminjam, dan sekaligus pemegang saham.

Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Mubyarto (1999:71), sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( *network* ) yang menghubungkan-hubungkan sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.

Ekonomi kerakyatan dan doktrin ekonomi Indonesia muncul dari falsafah Pancasila yang merupakan subsistem dari UUD 1945. Pasal utama bertumpunya doktrin ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Pasal-pasal itu bila dikaitkan dengan kerangka kerja ekonomi kerakyatan jelas mempunyai hubungan yang sangat erat. Sebab dalam ekonomi kerakyatan memuat pesan-pesan moral yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan serta berintikan kerakyatan.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang mengedepankan kepada optimalisasi potensi-potensi yang diperintah (masyarakat) baik potensi sumber daya manusia maupun optimalisasi sumber daya alam yang dikelola oleh manusia yang memiliki keretampilan khusus dan khas.

Konsep pemberdayaan muncul dan dikenal sebagai teori pembangunan kontemporer (teori pemberdayaan) yang menentang ala westernisasi-kapitalisme. Secara teoritik basis ideologi pemberdayaan adalah Neo Marxisme, karena menggunakan asumsi pembebasan dari ketindasan. Menurut Dharmawan (2000:4) ada beberapa asumsi kerja yang mendasari teori pemberdayaan sebagai berikut :

Fakta pertama adalah keterbelakangan atau keterpinggiran (diukur oleh derajat pendidikan, kesehatan, status pangan, status pendapatan, pemenuhan papan, akses informasi, hingga pada aktivitas (politik) sebagai akibat kapitalisme global. Fakta Kedua adalah ketertinggalan (ukur dari angka pencapaian sasaran indikator kemajuan yang dibandingkan secara relatif antara satu kelompok dengan kelompok lainnya). Fakta Ketiga adalah kemiskinan (diukur melalui angka pendapatan atau pengeluaran per kapita ataupun oleh pemenuhan kebutuhan fisik minimum seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan serta "martabat" individu sebagai manusia. Fakta keempat adalah ketergantungan (diukur oleh

derajat kebebasannya dalam menentukan nasib sendiri). Semua fakta itu bermuara ke satu titik persoalan, yaitu sindroma ketidakberdayaan dan ketidakmandirian.

Lebih lanjut Dharmawan (2000:8) mengemukakan prinsip penting yang mendasari aliran pembangunan kontemporer yaitu, partisipasi, demokrasi, kesejahteraan, kolektivitas dan pembangunan yang diinisiasi oleh kekuatan dari dalam. Pendekatan pemberdayaan menganalogikan bahwa komunitas sebagaimana layaknya kesatuan tubuh manusia yang bisa mengalami perubahan, berkembang, dan bahkan memiliki energi dan kekuatan dari dalam untuk berubah.

Konsep pemberdayaan (empowerment) dikemukakan pertama kali oleh Friedman (1992:124) memunculkan adanya premis yaitu “kegagalan dan harapan” Tindakan nyata kaum perempuan dalam pemberdayaan dapat diwujudkan dengan melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah melalui kegiatan koperasi. Usaha menambah pendapatan keluarga melalui kegiatan koperasi, cara paling efektif digunakan adalah dengan menumbuhkan inisiatif dan swakarsa kaum perempuan itu sendiri. Tindakan masyarakat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, interest masyarakat, adat-istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain (Maskun, 1994:43). Seringkali terjadi bahwa masyarakat lebih tahu permasalahan yang dihadapinya, tetapi tidak mampu mengatasinya karena keterbatasan-keterbatasan kemampuan masyarakat itu sendiri atau karena hambatan lingkungan sosialnya.

Dapat disimpulkan sementara bahwa keuntungan penerapan pembangunan berorientasi/berpusat pada rakyat adalah: kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan, koordinasi dapat dibangun secara harmonis dan lancar, terbangun rasa simpatik masyarakat terhadap karya pembangunan, menumbuhkan tanggung jawab dalam memelihara sarana prasarana yang telah dibangun bersama serta kendala yang timbul atau akan timbul dapat diatasi secara lebih mudah dan dini.

Penerapan pemberdayaan masyarakat paling banyak digunakan di sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Empat jalur strategis yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu perluasan kesempatan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. Perluasan kesempatan ditujukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hdiup secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan untuk menjamin semua masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar secara berkelanjutan.

Penguatan kapasitas ditujukan untuk mengembangkan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Terakhir, perlindungan socialditujukan khususnya pada kelompok-kelompok yang rentan (anak-anak, perempuan, orang tua, orang berkebutuhan khusus, dll) dan ditujukan pada masyarakat yang baru terkena bencana alam, resesi ekonomi, dan konflik sosial (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007:33–34). Atau pada kondisi yang umum, pemberdayaan masyarakat harus meliputi enabling (menciptakan suasana kondusif), empowering (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), protecting (perlindungan dan keadilan), supporting (bimbingan dan dukungan),

foresting (memelihara konduksi yang konduktivitas tetap seimbang) (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 117).

Pemberdayaan masyarakat jika dipilah berdasarkan pada tingkatan apa bekerjanya, maka akan diperoleh tiga tingkatan. Tingkatan pertama, pemberdayaan masyarakat berfokus di “ranting dan daun” atau pemberdayaan konformis. Pada tingkatan ini, pemberdayaan masyarakat lebih bersifat karitatif dan sinterklas, bentuknya adalah memberikan bantuan dalam bentuk modal maupun subsidi. Struktur sosial, politik, dan ekonomi dilihat sebagai sesuatu yang sudah ada. Tingkatan kedua berada pada “batang” atau pemberdayaan reformis. Pada tingkatan ini melihat akar permasalahan ada pada implementasi di lapangan dan operasionalisasi dari kebijakan. Struktur sosial, politik, dan ekonomi tidak dianggap masalah. Sedangkan, tingkatan terakhir terletak pada level “akar” atau pemberdayaan struktural. Masalah utama bagi tingkatan ini terletak pada struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan pihak yang lemah semakin melemah. Oleh sebab itu, tingkatan ini beranggapan harus dilakukan transformasi struktural. Penilaian secara umum, pemberdayaan yang banyak terjadi adalah pemberdayaan konformis, tingkat pertama. Sedikit yang menyentuh pada tingkatan kedua. (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 119 – 121).

Pemberdayaan masyarakat memiliki tiga sisi yaitu kesadaran, pembangunan kapasitas, dan pendayaan. Pada sisi pertama, kesadaran, target masyarakat diberikan pemahaman-pemahaman tentang hak-hak yang seharusnya dimiliki. Kegiatan yang dapat dilakukan pada tahapan ini adalah memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, kepercayaan, dan penyembuhan. Sisi kedua adalah peningkatan kapasitas atau memberikan kemampuan. Peningkatan kapasitas terdiri dari tiga jenis yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai. Sisi terakhir adalah pendayaan. Memberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007: 3 – 6).

## **PENUTUP**

*Credit Union* (CU) adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri, ini lah bentuk pemberdayaan masyarakat melalui koperasi *Credit Union* (CU) Khatulistiwa Bakti Pontianak. Sebagai lembaga keuangan mikro *non bank*, dapat melakukan kegiatan-kegiatan keuangan mikro (*micro finance*) dengan amat baik, yakni menyediakan jasa keuangan dan pengembangan kapasitas bagi anggotanya melalui pemberian pinjaman modal serta mewajibkan para anggotanya untuk selalu menabung melalui produk-produk simpanan yang telah disediakan. CU ini tidak semata-mata berorientasi untuk mencari keuntungan karena pendapatan usahanya dikembalikan kepada anggota dalam bentuk suku bunga simpanan yang lebih tinggi dan suku bunga pinjaman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Bagi hasil di dalam pengelolaan koperasi setiap anggota akan diberikan sisa hasil usaha (SHU) yang proporsional disesuaikan



dengan peran aktifnya dalam melakukan transaksi baik pinjaman maupun simpanan.

Perubahan sosial yang dialami oleh para anggota Koperas Credit Union (CU) Khatulistiwa Bakti sebagai dampak dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukannya nampak jelas terjadi pada:

- a. Stratifikasi sosial.
- b. Struktur sosial.
- c. Interaksi sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2005 *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Badaruddin & Nasution, M. Arief. 2005. *Modal sosial dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan (Isu- isu Kelautan dan Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir R. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- Boediono, 1999. *Ekonomi Makro*, Yogyakarta, BPTE.
- Bottomore, TB. dan Rubbel, Maximilen, 1956. *Karl Marx, Selected Writing in Sociology and Social Philosophy*. London: CA Watts Co Ltd.
- C.A. van Peursen. 1984. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Dudung, Abdul Adjid, 1985, *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Pertanian Berencana*. Bandung, Orba Sakti.
- Edilius & Sudarsono. 2005. *Koperasi Dalam teori dan Praktek*. Jakarta, Rhienaka Cipta.
- Eitzen, D. Stanley. 1983. *Social Problems*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Firdaus M dan Susanto, 2004. *Perkoperasian : Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Friedmann, John. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Cambridge, Blackwell.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Giddens, Anthony. 1989. *Sociology*. Cambridge: Polity Press.
- Hendrojogi, Drs, 1997, *Koperasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Irawan. 2005. *Ekonomi Pembangunan Edisi 6*. Yogyakarta. BPFE
- Jhingan, ML. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Krisnamurthi, 2002. *Membangun Koperasi Berbasis Anggota Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat*. Bogor. Pusat Studi Pembangunan,.
- Lauer, Robert H. (1993). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. : Jakarta. Rineka Cipta.

- Lepi, T Tarmidi. 1992. Ekonomi Pembangunan. Jakarta. Depdikbud.
- Maryati,K dan Suryawati,J, 2003, Sosiologi I, Jakarta. Erlangga.
- Maskun, Sumitro. 1994. Pembangunan Masyarakat Desa: Asas, Kebijaksanaan dan Manajemen. Yogyakarta:MW Mandala.
- Moleong, J. Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Moore, H.Frazier,2000. Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus dan Masalah, Bandung, PT. Remaja Rusdikarya.
- Mubyarto. 1999. Reformasi sistem Ekonomi, dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan.Yogyakarta: Aditya Media.
- Munaldus,dkk,2012. Credit Union: Kendaraan Menuju Kemakmuran, Praktek Bisnis Sosial Model Indonesia, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo.
- Mutis,Thoby, 1992, Pengembangan Koperasi, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indoonesia.
- Midgley, James, 1995, Social Development : The Development Perspective in Social Welfare, London. PAGE Publication Inc.,
- Nasution. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung, Tarsito.
- Nazir, M, (1993), Metode Penelitian, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Pratikno, Riyono, 1982, Komunikasi Pembangunan, Bina Cipta Bandung.
- Purwoko,Bambang. 2004. *Pembaruan Kabupaten Arah Realisasi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant N. Dwidjowijoto. 2007. Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT. ElexMedia Komputindo.
- Rindarjono, M.G.. 1994. Pengaruh Luas Penguasaan Lahan Terhadap Kedudukan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kedudukan Sosial Rumah Tangga Petani di Dua Desa di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana, UGM.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Alurni.
- Soerjono Soekanto,1974. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sorokim, Pitirim.A. 1957, Social and Cultural Dynamics, Boston : Sargent.
- Sukamdiyo. 1996. Manajemen Koperasi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sukirno,Sadono, 1985, Ekonomi Pembangunan, Jakarta. LPEF UI.Bina Grafika
- Sunarto. 2006. Manajemen Koperasi. Yogyakarta. Amus.
- Susanto, Astrid, S.. 1985. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bandung: Bina Cipta.

- Suparlan, Parsudi, 1980, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Perspektif Antropologi Budaya Dalam Yang Tersirat dan Tersurat*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Tjiptono, Fandy. 2001, *Strategi Pemasaran Edisi Pertama*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Triyono, Lambang dan Nasikun. 1992. *Proses Perubahan Sosial di Desa Jawa*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Umar, 1986. *Sosiologi : Persoalan, Teoritis dan Metode*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1999, *Studi Pemberdayaan Ekonomi dan Marjinalisasi Wanita Tani di Perdesaan, Lampung*, Universitas Lampung.
- Widiyanti, Ninik. 2002. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dokumen Pemerintah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Gunung Ilmu Pres Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

DILARANG MENYALIN